

## **Pengaruh Pembangunan di Jakarta Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Betawi Tahun 1966-1977**

**Nurul Lukmansyah** ✉, **Wasino, Tsabit Azinar Ahmad**

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### **Info Artikel**

*Sejarah Artikel:*

Diterima Agustus 2016  
Disetujui September 2016  
Dipublikasikan Oktober 2016

*Keywords:*

*Development, betawi, Jakarta, Ali Sadikin.*

### **Abstrak**

Kebijakan pemerintah Jakarta di tahun 1966-1977 terfokus pada perbaikan, rehabilitasi dan pembangunan kota. Pembangunan yang terus dilakukan oleh pemerintah berhasil merubah wajah Kota Jakarta menjadi kota Metropolitan. Akan tetapi, pembangunan yang semakin gencar pada masa itu tidak dirasakan oleh semua kalangan, terutama masyarakat Betawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Masyarakat Betawi terlahir karena luntarnya identitas asli mereka yang disebabkan banyaknya perkawinan campur antar etnis di Batavia. Pada masa kolonial masyarakat ini memiliki kualitas hidup yang sangat rendah, sedangkan pada masa kemerdekaan mengalami peningkatan, namun tidak terlalu besar. (2) Bentuk-bentuk marginalisasi yang dialami oleh masyarakat Betawi antara lain, marginalisasi penduduk, marginalisasi tempat tinggal dan marginalisasi ekonomi. (3) Faktor-Faktor penyebab marginalisasi masyarakat Betawi antara lain, faktor internal seperti kualitas hidup yang rendah dan pengaruh agama yang kuat. Faktor eksternalnya berupa penggusuran dan urbanisasi. Dampak-dampak marginalisasi antara lain dampak sosial, ekonomi dan budaya.

### **Abstract**

*The wisdom of government in Jakarta 1966-1977 focus on improvement, rehabilitation, and development in city. The development that done by him was get the changing of the town of Jakarta to be a metropolitan city. But, the development doesn't same to all a people, especially Betawi's people. The result was show that (1) Betawi's people was born from faded of their original identity which cause by married of assortment accompany ethnic in Batavia. In colonial era Betawi's people has live quality in bad quality while in era of independence Indonesia the were change but not all (2) from of marginalitation in Betawi people was as like as, marginalitation of people, the marginalitation of residence and economic marginalitaion (3) the factors and effect marginalitation in Betawi's people like, internal factor which is from Betawi's people like their quality of life is low and influence from their religion. External factor as like as condemnation and urbanitation. The effect marginalitation was like the effect from social, economic, and culture.*

© 2016 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung C5 Lantai 1 FIS Unnes  
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229  
E-mail: [sejarah@mail.unnes.ac.id](mailto:sejarah@mail.unnes.ac.id)

## PENDAHULUAN

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) adalah ibu kota negara Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Jakarta terletak di bagian barat laut Pulau Jawa. Jakarta memiliki luas sekitar 661,52 km<sup>2</sup> dan lautan 6.977,5 km<sup>2</sup>- dengan penduduk berjumlah 9.607.787 (Badan Pusat Statistik, 2015). Jakarta merupakan kota yang memiliki sejarah panjang yang akhirnya membentuk kota ini menjadi kota Metropolitan.

Periode 1966 hingga 1977 adalah masa pembangunan Jakarta yang cukup besar. Pada saat itu, Jakarta berada di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Ali Sadikin, salah satu yang menyedot perhatian adalah kebijakan legalisasi perjudian dan prostitusi. Ali Sadikin mendapat kecaman dari berbagai kalangan masyarakat pada saat itu (Ramadhan, 2012: 49), kebijakan tersebut diambil guna menambah pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan Kota Jakarta.

Pembangunan dan perubahan yang dilakukan Ali Sadikin selama menjabat gubernur antara lain, Pembangunan peremajaan Pasar Senen, pembangunan Taman Rekreasi Ancol, pemindahan Kebun Binatang dari Cikini ke Ragunan, pembangunan Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki (TIM), di bekas Kebun Binatang Cikini, Jakarta Fair sebagai kelanjutan Pasar Malam Gambir, lokalisasi dan legalisasi perjudian, lokalisasi pelacuran Kramat Tunggak, program Keluarga Berencana (KB), pembangunan dan renovasi berbagai kepentingan publik, seperti rumah sakit, puskesmas, bus transportasi umum, sekolah, pasar, gelanggang remaja, fasilitas olahraga, membantu mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pelebaran jalan dan jembatan, serta banyak lagi lainnya (Lubis, 2008: 41).

Di balik gencarnya pembangunan, terdapat suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri yaitu banyak terjadi penggusuran. Pihak yang paling banyak menjadi korban penggusuran adalah masyarakat Betawi. Mereka

merupakan penduduk yang dikenal memiliki tanah yang luas, namun karena pembangunan kota memerlukan lahan yang banyak, tanah-tanah masyarakat Betawi pun akhirnya terkena pembebasan lahan, bahkan mereka kehilangan tempat tinggal.

Pada kasus pelebaran jalan, Gubernur Ali Sadikin berani melaukan pemotongan pekarangan rumah, toko atau kantor dengan dalih demi kepentingan umum (Lubis, 2008: 41). Contoh kasus lainnya adalah ketika pembangunan perumahan elit Pondok Indah, di sini, sebuah perusahaan mengklaim lahan untuk membangun kompleks yang terdiri dari perumahan mewah, sebuah pusat perbelanjaan dan sebuah lapangan golf di atas tanah seluas 300 hektare yang dihuni para petani Betawi (Blackburn, 2011: 311). Banyaknya penggusuran yang terjadi di Jakarta pada masa pemerintahan Ali Sadikin menyebabkan terjadinya marginalisasi masyarakat Betawi, mereka yang semula banyak tinggal di pusat Jakarta mulai tergeser ke pinggiran-pinggiran Jakarta.

## METODE

Sebagai kajian sejarah, penelitian ini menggunakan metode sejarah yang mencakup empat langkah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Gottschalk, 1986: 34). Menurut terminologinya heuristik (heuristic) berasal dari bahasa Yunani heruristiken = mengumpulkan atau menemukan sumber (Pranotto, 2010: 29). Pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan melalui metode penelitian dengan teknik pengumpulan data dari proses penggalian sumber-sumber sejarah yang berupa arsip, surat kabar, foto, buku, dan sumber lisan yang diperoleh dari Arsip Nasional Jakarta, Arsip LBH, Badan Pusat Statistik Jakarta, Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jakarta, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Universitas Negeri Semarang, serta sumber lisan yang merupakan pelaku sejarah dan budaywan Betawi.

Tahapan kedua adalah melakukan kritik sumber terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh. Dalam hal ini yang harus diuji adalah

keabsahan tentang masalah otentitas yang dilakukan melalui kritik ekstern dan keabsahan tentang masalah kredibilitas melalui kritik intern. Kritik ini diperoleh dengan cara penilaian intrinsik daripada sumber-sumber dan membandingkan kesaksian daripada pelbagai sumber (Wasino, 2007: 55). Setelah melalui tahapan kritik sumber, kemudian dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap fakta sejarah yang diperoleh melalui arsip, buku, maupun hasil penelitian di lapangan. Tahap ini sangat penting agar penulis terhindar dari subjektivitas. Historiografi merupakan langkah terakhir setelah ketiga prosedur yang lain telah dipenuhi. Historiografi merupakan penulisan kembali peristiwa sejarah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Masyarakat Betawi pada Awal Terbentuknya Hingga Tahun 1950-an

Para ahli kependudukan dan budaya perkotaan sering menyebut bahwa kota adalah melting pot atau panci pelebur dimana orang dari berbagai macam etnis dan bangsa melebur menjadi satu (Basundoro, 2012). Hal tersebut juga terjadi di Batavia pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Berdasarkan latar belakangnya penduduk Batavia yang tinggal di dalam maupun di luar tempok kota terbagi dalam beberapa kelompok, antara lain kelompok pertama ialah orang-orang Eropa dan Mestizo, kelompok kedua ialah orang-orang Timur asing yang terdiri dari orang Cina, Arab, Parsi serta Gujarat, kelompok ketiga ialah orang-orang Pribumi (Chaer, 2015:41-42). Pengelompokan ini dilakukan agar memudahkan pengawasan keamanan kota Batavia, selain itu pemerintah kolonial juga melarang adanya perkawinan antar etnis.

Peraturan-peraturan tersebut juga memiliki tujuan untuk membatasi keberagaman yang ada di Batavia, namun keadaan sebenarnya berkata sebaliknya. Perkawinan antar etnis masih terjadi di Batavia, hal ini dikarenakan tidak pernah adanya tindakan hukum terhadap mereka yang melakukan pelanggaran tersebut (Raben dalam Grijns, dkk,

2007: 111). Banyaknya perkawinan campuran antar etnis pada akhirnya menyebabkan suatu fenomena luntarnya identitas etnis-etnis tersebut. P.H Willemse dalam arsip Memorie van Overgave (memori serah terima jabatan) residen Batavia menjelaskan bahwa:

*“... door allerlei kruizingen en mengingen een volkstype ontstaan, dat als het ware een eigen ras vormt, de Batavianen, die in vele eigenaardigheden, in het bijzonder de taal, waarover nader meer, can hun eerste voorouders verschillen.” (Willemse, 1931).*

... oleh berbagai persilangan dan percampuran suatu tipe etnis muncul yang sebagaimana jadinya membentuk sebuah ras sendiri, yaitu orang Batavia (Betawi), yang di dalamnya banyak keunikan, terutama di dalam hal bahasa, sangat berbeda dari nenek moyang mereka.

Berdasarkan arsip tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat Betawi adalah masyarakat yang terlahir dari percampuran beragam etnis masyarakat di Batavia. Asal muasal kata Betawi memiliki bermacam versi, pendapat pertama mengungkapkan bahwa kata Betawi berasal dari Batavia, karena orang-orang pribumi tidak bisa menlafalkan dengan benar mereka menyebutnya menjadi Betawi. Pendapat kedua mengungkapkan bahwa kata Betawi berasal dari nama pohon, yaitu Gulinging Betawi yang saat itu banyak tumbuh di Nusa Kelapa (Jakarta) dan di Kalimantan Barat dikenal dengan nama Bekawi (Saidi dalam Chaer, 2015:45). Pendapat kedua lebih banyak disepakati oleh budayawan-budayawan karena di Jakarta banyak nama-nama daerah yang juga berasal dari nama tumbuhan atau pohon.

Keadaan demografi masyarakat Betawi pada masa kolonial dapat diketahui sebagai berikut, jumlah populasi masyarakat Betawi diketahui pada tahun 1930 berjumlah 419.000 orang (Castle, 2008). Pemukiman orang Betawi terbagi-bagi dalam kampung yang tersebar di seluruh kota Batavia dan di distrik sekitarnya hingga ke pegunungan (Blackburn, 2011:92). Tingkat pendidikan formal masyarakat Betawi pada masa ini masih sangat rendah, mereka hanya mengandalkan pendidikan agama di pesantren. Keadaan ekonomi mereka tidak begitu menonjol, pada umumnya kebanyakan

masyarakat Betawi mengolah tanah miliknya untuk perkebunan.

Sebagai suatu etnis, masyarakat Betawi tentu saja memiliki ciri khas tersendiri agar dapat dibedakan dengan etnis lainnya. Ciri umumnya masyarakat Betawi adalah pemeluk agama Islam yang fanatis, mereka berbicara dengan dialek Melayu yang khas, mereka juga dikenal sebagai masyarakat egaliter yang dapat menerima siapa saja tanpa memandang ras atau agamanya. Pada masa kemerdekaan Indonesia keadaan Kota Jakarta perlahan mengalami perubahan, pada tahun 1945-1950 keadaan Jakarta masih belum terlalu aman karena masih dalam masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, namun setelah keadaan kota menjadi aman para pendatang dari berbagai daerah mulai memadati Jakarta yang pada saat itu mulai dibangun menjadi Ibukota Negara Indonesia. Kepadatan kota terus bertambah hingga tahun 1966 penduduk Jakarta mencapai angka 4.122.834 jiwa (Jakarta dalam Angka, 1972:13).

Keadaan Kota Jakarta yang semakin padat penduduk tersebut membawa perubahan pada keadaan demografi masyarakat Betawi di masa kemerdekaan Indonesia, berikut penjelasannya. Mengenai jumlah populasi dapat diketahui pada tahun 1961 masyarakat Betawi berjumlah 655.404 jiwa dari 2.906.533 keseluruhan penduduk di Jakarta (Castels, 2008:185). Pemukiman masyarakat Betawi pada masa ini mulai terpinggirkan sebagai akibat gengarnya pembangunan kota. Dulu kampung Betawi tengah kota terletak di wilayah Taman Sari, Sawah Besar, Kebon Jeruk, Kerekot, Krukut, Kramat, Tanah Abang, Cikini, Kali Pasir, Petojo, Tanah Sereal, Kemayoran, Petamburan, Karet dan Kebon Sirih (Alkatiri, 2012:117).

Tingkat pendidikan formal masyarakat Betawi pada masa ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan, fasilitas pendidikan lebih banyak berada di pusat kota dan hanya bisa diakses oleh golongan tertentu. Pola pikir masyarakat Betawi kala itu juga masih mementingkan mengaji dan beladiri (Diyanti, 2013: 121). Begitu pula keadaan ekonomi

mereka, belum ada kemajuan yang signifikan. Mereka masih mengandalkan hidup dari mengelola lahannya dengan bertani atau berkebun, berternak, dan sebagian menjadi pegawai.

### **Ali Sadikin dan Pembangunan Jakarta**

Ali Sadikin diangkat menjadi Gubernur Jakarta oleh Sukarno pada April 1966, usianya 39 tahun dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan Laut dalam kabinet pimpinan Sukarno (Blackburn, 2012:291). Jakarta diawal kepemimpinan Ali Sadikin adalah kota yang sangat kelebihan beban. Kota Jakarta yang semula direncanakan oleh Pemerintahan Belanda sebelum perang hanya menampung 600.000 penduduk, pada tahun 1961 telah berpenduduk 3 juta jiwa (Sadikin, 1977:221). Keadaan fisik kota Jakarta tidak diimbangi dengan kebutuhan penduduk yang terus meningkat, pada dasarnya sarana-sarana telah tersedia, namun kondisinya kurang baik dan harus diperbaiki dalam berbagai tingkatan.

Sebagai solusi atas keadaan Jakarta yang sedemikian rupa dibuatlah Rencana Induk pembangunan Jakarta 1965-1985. Rencana ini merupakan master plan yang akan merubah wajah Jakarta. Upaya pembangunan tentu ada alikasi dana khusus, anggaran untuk pembangunan yang direncanakan oleh Pemda Jakarta adalah sebesar 50% dari APBD. Anggaran ini banyak didapat dari pajak-pajak yang diberlakukan oleh pemerintah, penghasilan pajak paling besar berasal dari pajak judi dan lokalisasi, selain pajak pendapatan Jakarta diperoleh melalui investasi asing yang menanamkan modal mereka di Jakarta. Pada tahun 1966-1977 anggaran kota yang semula Rp. 1,2 milyar tumbuh menjadi Rp. 89,5 milyar pada 1977-1978 (Blackburn, 2012:295).

Dalam Pelita I 1969/1970 dan Pelita II 1973/1974-1974-1975 di DKI Jakarta proyek-proyek pembangunan dikelompokkan menurut pembidangnya, yaitu bidang Pemerintahan, Bidang Keamanan dan Ketertiban, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Prasara, Bidang Perekonomian, dan Bidang Perbaikan

Perkampungan. Hasil pembangunan lain yang dicapai Ali Sadikin antara lain, pembangunan peremajaan Pasar Senen, pemindahan Kebun Binatang dari Cikini ke Ragunan, pembangunan pusat kesenian Taman Ismail Marzuki (TIM) di bekas Kebun Binatang Cikini, Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, pembangunan serta renovasi berbagai kepentingan publik, seperti rumah sakit, puskesmas, bus transportasi umum, sekolah, pasar, gelanggang remaja, fasilitas olahraga, membantu mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pelebaran jalan dan jembatan. Selain pembangunan secara fisik, terdapat pula kebijakan-kebijakan pembaruan yang dilakukan Ali Sadikin, seperti mengadakan acara Pekan Raya Jakarta sebagai kenlanjutan dari Pasar Gambir, mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) guna menekan angka pertumbuhan penduduk, serta banyak lagi lainnya.

#### **Terpinggirkannya Masyarakat Betawi**

Gencarnya pembangunan di Jakarta pada masa pemerintahan Ali Sadikin memang berdampak baik bagi perkembangan fisik maupun perkembangan ekonomi Kota Jakarta, namun pembangunan-pembangunan tersebut berdampak lain bagi masyarakat Betawi. Berdasarkan Rencana Induk Jakarta setiap daerah sudah memiliki fungsinya masing-masing, apabila terjadi penggunaan tanah oleh masyarakat yang ternyata tidak sesuai dengan planologi kota, pemerintah memiliki suatu kebijakan dimana mereka harus mau melepas hak tanahnya dan pindah ke tempat lain dengan memberi biaya ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sadikin, 1977:228).

Kebijakan pembangunan pemerintah memiliki sifat yang paradoksal, disatu sisi pembangunan dengan segala dinamikanya akan diproyeksikan untuk meningkatkan kemakmuran bagi masyarakatnya, akan tetapi disisi lain munculnya kebijakan itu menimbulkan marginalisasi masyarakat yang tidak bisa dihindarkan. Dilihat dari etimologinya marginalisasi berasal dari kata marginal yang berarti berhubungan dengan tepi atau berada di pinggir (Kamus Besar Bahasa Indonesia,

2008:879). Menurut Murniati (2004:xx), marginalisasi berarti menempatkan atau menggeser ke pinggiran. Marginalisasi merupakan proses pengabaian hak-hak yang seharusnya didapat oleh pihak yang termarginalkan. Namun, hal tersebut diabaikan dengan berbagai alasan demi suatu tujuan. Berkenaan dengan itu maka marginalisasi dapat diartikan sebagai usaha atau proses yang membatasi atau meminggirkan peran suatu kelompok tertentu. Menurut Minawati (2009:4), marginalisasi diartikan suatu posisi atau sisa atau korban dalam hubungannya dengan oposisi biner (binary opposition). Dalam kaitan ini masyarakat Betawi sebagai kelompok yang lebih lemah dibanding dengan pemerintah, pihak swasta dan para pendatang.

Proses marginalisasi dimulai ketika Jakarta telah menjadi kota yang sangat diminati oleh bermacam-macam kalangan masyarakat. Persaingan semakin ketat untuk bisa bertahan hidup di Ibukota, taraf-taraf kehidupan semakin tinggi dan pekerjaan semakin beragam dengan kualifikasi yang cukup ketat. Masyarakat Betawi yang saat itu hidup dengan cara tradisional mulai merasa terjepit, mereka sudah tidak bisa lagi memanfaatkan sawah atau kebunnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka juga tidak mampu bersaing dengan para pendatang karena pendidikan formalnya rendah.

Kedadaan yang demikian mendorong masyarakat Betawi untuk mengambil langkah instan, yaitu menjual tanah mereka yang luas agar mendapat uang ganti rugi guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Langkah tersebut berhasil untuk sementara waktu, mereka yang tidak dibekali pendidikan dan keahlian tidak bisa memanfaatkan uang ganti rugi sebagai modal usaha di tempat tinggalnya yang baru. Sebagian besar hanya dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hingga akhirnya masyarakat Betawi kembali mengalami kesulitan ekonomi. Berdasarkan penuturan narasumber, mereka kembali menjual tanahnya dan berakhir dengan terpinggirkan dari Jakarta bahkan hingga keluar dari Jakarta (wawancara dengan Tohir 24 Juli 2016).

### Bentuk-Bentuk Terpinggirkannya Masyarakat Betawi

Setelah mengetahui bagaimana proses marginalisasi masyarakat Betawi berikut ini akan dijelaskan bentuk-bentuk marginalisasi yang diterima oleh masyarakat Betawi. Pertama, marginalisasi penduduk adalah bentuk marginalisasi yang disebabkan banyaknya pendatang dari berbagai daerah ke Jakarta dan membuat masyarakat Betawi menjadi kelompok minoritas.

**Tabel 1.** Banyaknya Penduduk di DKI Jakarta tahun 1966-1977

Tahun	Banyaknya Penduduk	Tahun	Banyaknya Penduduk
1966	4.122.834	1972	4.755.279
1967	4.339.727	1973	4.973.210
1968	4.500.675	1974	5.182.597
1969	4.751.945	1975	5.403.957
1970	4.437.135	1976	5.701.469
1971	4.574.056	1977	5.925.417

Sumber: Jakarta dalam Angka (1972:13)

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa ada peningkatan penduduk di Jakarta setiap tahunnya, namun data jumlah masyarakat Betawi dari tahun 1966-1977 tidak dapat diketahui karena survey sensus pada saat itu tidak lagi berdasarkan asal daerah. Sumber lain seperti surat kabar *Kompas* sempat menggambarkan eksistensi masyarakat Betawi, dikatakan bahwa masyarakat Betawi di tahun 1970-an telah melemah dan sudah tidak terlihat lagi eksistensinya di Jakarta (*Kompas*, 2 Februari 1973). Berdasarkan penturan narasumber juga dapat diketahui bahwa di Grogol Selatan pada tahun 1970-an dari 37 kepala keluarga hanya 10 keluarga yang merupakan orang Betawi (wawancara dengan Tohir 24 Juli 2016). Keadaan tersebut semakin diperparah dengan kenyataan bahwa masyarakat Betawi tidak mampu bersaing dengan para pendatang yang lebih siap menghadapi tantangan di Jakarta.

*Kedua*, marginalisasi tempat tinggal adalah bentuk marginalisasi yang terjadi akibat dari pengusuran-pengusuran. Masyarakat Betawi yang semula tinggal di dekat kota perhalan mulai terpinggirkan karena mereka menjual tanahnya yang akan digunakan sebagai

lahan pembangunan. Salah satu contohnya terjadi pada tahun 1972 di kaveling yang terletak di Cileduk. Kaveling tersebut merupakan tempat tinggal masyarakat Betawi yang dulu tinggal di Senayan, mereka direlokasi karena tanahnya digunakan untuk membangun fasilitas olahraga penunjang Asian Games (*Kompas*, 29 April 1972). Dijelaskan bahwa kaveling tersebut nantinya akan digunakan sebagai perumahan Kodam V Jaya, masyarakat di sana menerima untuk digusur namun permasalahan timbul karena uang ganti rugi yang diajukan terbilang kecil. Berdasarkan contoh tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat Betawi yang sebelumnya pernah tergusur masih tetap mengalami pengusuran dikemudian hari, sehingga membuat mereka semakin terpinggirkan dari Jakarta.

*Ketiga*, marginalisasi ekonomi adalah bentuk marginalisasi yang disebabkan pengusuran-pengusuran lahan usaha milik masyarakat. Sebelum maraknya pembangunan, masyarakat Betawi biasa hidup dengan memanfaatkan tanahnya yang luas dengan cara berkebun, bertani, atau berternak, akan tetapi ketika banyaknya pembangunan tanah-tanah milik masyarakat betawi tersebut banyak yang dibebaskan dan dijual. Salah satu contohnya terjadi ketika pembangunan perumahan elite Pondok Indah, di kompleks tersebut akan dibangun pusat perbelanjaan dan sebuah lapangan golf di atas tanah seluas 300 hetare yang dihuni petani Betawi (Blackburn, 2012: 311). Akibatnya mereka kehilangan tempat tinggal beserta lahan usahanya dan pihak pemerintah maupun swasta tidak menjamin lingkungan masyarakat Betawi yang baru akan lebih baik atau tidak. Pada akhirnya mereka yang tergusur tidak mampu bersaing dengan para pendatang.

### Faktor-Faktor Terpinggirkannya Masyarakat Betawi

Faktor-faktor pendorong terjadinya marginalisasi masyarakat Betawi di Jakarta dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat Betawi itu sendiri. Kualitas kehidupan masyarakat Betawi

yang sejak tahun 1940-an kurang baik dimana tingkat pendidikan dan ekonominya yang rendah membawa dampak yang cukup besar pada tahun 1970-an. Pada masa itu, kehidupan masyarakat Betawi sangat terdesak karena tidak bisa lagi bertahan dengan perkembangan kota beserta persaingan yang semakin ketat. Ketika pemerintah atau pihak swasta membutuhkan tanah untuk keperluan pembangunan, masyarakat Betawi tidak menolak saat tanah mereka ditawarkan untuk dijual. Hal itu dilakukan dengan harapan kehidupan mereka menjadi lebih baik.

Latar belakang agama Islam yang kuat juga mempengaruhi mereka, sebagaimana dijelaskan oleh narasumber dalam Islam dituntut untuk taat kepada Allah, Rasul dan Pemimpin, sehingga ketika pemerintah meminta mereka menjual lahannya akan diikuti (wawancara dengan Chaer 27 Juli 2016). Jika dilihat dari beberapa contoh kasus penggusuran yang telah peneliti jelaskan tidak ada aksi-aksi protes dalam hal penolakan untuk digusur, mereka menerima keputusan pemerintah selama harga ganti rugi sesuai dengan keinginan mereka. Jika terjadi aksi penolakan hal tersebut karena terjadi pembongkaran paksa saat belum adanya kesepakatan uang ganti rugi dan permasalahan akan dibawa ke pengadilan dengan bantuan LBH.

Faktor eksternal marginalisasi masyarakat Betawi berasal dari pengaruh luar seperti pihak pemerintah, swasta dan para pendatang. Pengaruh dari luar tersebut berbentuk penggusuran dan urbanisasi. Pada masa pemerintahan Ali Sadikin, penggusuran di Jakarta mulai terjadi pada tahun 1971-1975 dan paling sering terjadi di tahun 1972, karena pada tahun ini pembangunan Kota Jakarta masuk dalam tahap inti dari Pelita 1971/1972 yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur kota.

Pada tahap awal pemerintah kota melakukan penertiban bangunan dan lahan yang tidak sesuai dengan Renca Induk. Penertiban dilakukan di sekitar tanam makam pahlawan Kali Bata, daerah-daerah pusat kota seperti di Jl. Pemuda, Jl. Pramuka dan jalan raya yang

memasuki Jakarta dari Bogor (*Kompas* 27 Agustus 1971). Selanjutnya dilakukan penertiban bangunan-bangunan dalam rangka pelebaran jalan-jalan yang saat itu sudah tidak dapat menampung volume kendaraan di Jakarta.

Tahap selanjutnya fokus pembangunan beralih pada proyek-proyek perumahan, hal ini terjadi karena pada tahun 1972-1975 penduduk Jakarta semakin meningkat sehingga kebutuhan akan tempat tinggal terus bertambah. Hal yang disayangkan adalah dalam pembangunan proyek-proyek tersebut sering sekali didirikan di atas permukiman masyarakat Betawi. Seperti yang terjadi pada bulan Juli 1972, yaitu penggusuran perkampungan Betawi di Simprug yang akan dibangun perumahan elite (*Kompas*, 24 Juli 1972). Peristiwa Simprug ini sangat disoroti oleh media pada saat itu, hal ini terjadi karena terjadi perseteruan antara masyarakat Betawi Simprug dengan pihak kontraktor. Permasalahan bermula ketika terjadi pembongkaran rumah warga secara paksa, saat itu belum ada kata sepakat untuk jumlah uang ganti rugi. Pihak warga kemudian membawa kasus ini ke LBH, bahkan pihak LBH selanjutnya melaporkan kasus ini kepada Ali Sadikin yang kemudian memberi anjuran kepada pihak kontraktor untuk menyelesaikan masalah ganti rugi secara tenang. Meski terjadi bermacam-macam insiden pada akhirnya berkat bantuan LBH permasalahan ganti rugi bisa diselesaikan dengan damai. Masyarakat Simprug kemudian direlokasi ke Kampung Rawa.

Faktor eksternal selanjutnya adalah urbanisasi. Urbanisasi dapat dikatakan sebagai proses bertambahnya penduduk kota yang berasal dari pendatang baru, jadi tidak termasuk pertambahan alamian, tidak terbatas dari daerah atau desa, tetapi bisa juga dari kota atau negara lain (Sedyawati, dkk, 1986: 62). Banyaknya urbanisasi ke Jakarta membawa dampak bagi keadaan kota, pada kenyataannya tidak semua mereka yang berurbanisasi memiliki sumber daya manusia (SDM) yang baik. Mereka yang SDMnya rendah hanya membuat beban bagi pemerintah dan berakhir menjadi penghuni liar,

sedangkan mereka yang SDMnya baik membawa dampak baik bagi perkembangan kota.

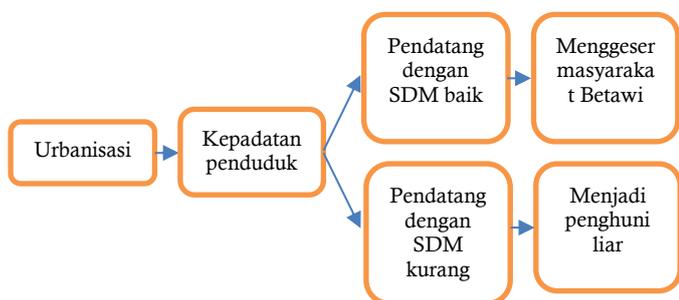
baru berupa tanah-tanah kaveling dan jumlah pembelinya dibatasi oleh pemerintah.

*Kedua*, dampak ekonomi berupa menurunnya kualitas ekonomi masyarakat Betawi. Setelah termarginalkan, masyarakat Betawi banyak yang kehilangan lahan usahanya. Pada dasarnya, mereka mendapatkan uang yang cukup banyak dari hasil penjual tanah, namun uang tersebut tidak dimanfaatkan untuk membuka kembali usahanya di tempat tinggalnya yang baru, uang itu hanya digunakan untuk keperluan sehari-hari, setelah uang tersebut habis masyarakat Betawi baru merasakan dampak dari marginalisasi dan baru berusaha mencari pekerjaan. Akan tetapi, mereka yang tidak memiliki keterampilan khusus, ataupun pendidikannya yang tidak tinggi, mereka tidak akan sanggup bersaing dalam mencari pekerjaan. Keadaan tersebut berdampak pada menurunnya kualitas ekonomi masyarakat Betawi.

*Ketiga*, dampak sosial berupa hilang dan lunturnya beberapa kebudayaan masyarakat Betawi. Setelah termarginalkan, rumah-rumah adat Betawi adalah kebudayaan yang pertama kali mulai luntur sebagai dampak dari penggusuran yang terjadi di kampung-kampung masyarakat Betawi. Pembangunan yang marak terjadi di Jakarta berdampak pada semakin sedikit tanah luas yang tersedia di kota, hal ini berdampak pada beberapa kesenian masyarakat Betawi seperti pertunjukan Lenong. Pertunjukan ini mengalami perubahan, pada awalnya pertunjukan ini berlangsung semalam suntuk, namun karena keterbatasan lahan kini pertunjukan hanya ditampilkan pada acara-acara tertentu dan hanya berlangsung beberapa jam saja. Selain itu, kesenian musik Betawi juga banyak yang hilang karena perkembangan kota dan modernisasi.

## SIMPULAN

Masyarakat Betawi adalah masyarakat yang terlahir dari percampuran bermacam etnik di Batavia. Pada masa kolonial kehidupan masyarakat Betawi masih sangat sederhana dan tradisional, pada saat masa kemerdekaan keadaan mereka belum mengalami peningkatan



**Gambar 1.** Bagan Dampak Urbanisasi di Jakarta

Selain berdampak kepada keadaan kota, urbanisasi juga mempengaruhi masyarakat di Jakarta, khususnya masyarakat Betawi. Masyarakat Betawi yang saat itu kondisinya kurang menguntungkan mulai tergeser perannya oleh pendatang yang memiliki SDM baik. Persaingan untuk mencari pekerjaan dikuasai oleh para pendatang, masyarakat Betawi tidak mampu bersaing karena tingkat pendidikannya yang rendah dan semangat yang tidak lebih baik dari para pendatang.

## Dampak- Dampak Terpinggirkannya Masyarakat Betawi

Secara garis besar dampak-dampak marginalisasi dibagi menjadi tiga, yaitu dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak budaya. *Pertama*, dampak sosial yang dialami oleh masyarakat Betawi berupa hilangnya jaringan sosial kekerabatan serta hilangnya suasana gotong royong. Setelah termarginalkan, masyarakat Betawi yang sebelumnya hidup berdampingan dengan sanak saudaranya kini telah terpencar-pencar. Mereka hidup dilingkungan yang baru, perubahan lingkungan tempat tinggal ini selanjutnya memicu perubahan sosial dalam diri masyarakat Betawi. Perubahan tersebut antara lain hilangnya jaringan sosial kekerabatan serta hilangnya suasana gotong royong dalam diri masyarakat Betawi. Selain itu, gaya kehidupan masyarakat Betawi juga berubah mereka tidak lagi memiliki tanah-tanah yang luas, karena di tempat tinggalnya yang

yang signifikan. Perubahan mulai terjadi ketika Jakarta dipimpin oleh Ali Sadiki, gencarnya pembangunan kota berdampak pada masyarakat Betawi. Kebijakan pembangunan membuat masyarakat Betawi yang tidak mampu bersaing terpinggirkan dari Jakarta, mereka termarginalkan secara kependudukan, tempat tinggal dan ekonomi. Faktor pendorong terjadinya marginalisasi secara internal dikarenakan rendahnya kualitas hidup mereka dan pengaruh agama Islam yang kuat, sedangkan faktor eksternal dikarenakan banyaknya penggusuran dan urbanisasi. Dampak dari marginalisasi yang dirasakan masyarakat Betawi berupa dampak sosial, ekonomi dan budaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip

Jakarta dalam Angka. 1972. Kantor Sensus Dan Statistik DKI Jakarta.

Willemse, P.H. 1930. *Memorie van Overgave, Residentie Batavia dd 26 October 1931*.

### Buku

Alkatiri, Zeffry. 2012. *Jakarta Punya Cara*. Depok: Masup Jakarta.

Blackburn, Susan. 2011. *Jakarta Sejarah 400 Tahun*. Jakarta: Masup Jakarta.

Castles, Lance. 2008. *Profil Etnik Jakarta*. Jakarta: Masup Jakarta.

Chaer, Abdul. 2015. *Betawi Tempo Doeloe: Menelusuri Sejarah Kebudayaan Betawi*. Jakarta: Masup Jakarta.

Daliman, A. 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Lubis, Firman. 2008. *Jakarta 1960-an: Kenangan Semasa Mahasiswa*. Jakarta: Masup Jakarta.

Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.

Grijns, Kees., Peter J.M. Nas. 2007. *Jakarta-Batavia: Esai Sosio-Kultural*. Jakarta: Banana KITLV-Jakarta.

Minawati, Rosta. 2009. *Keterpinggiran Komunitas Hindu dalam Pruralitas Agama di Kabupaten Karo Sumatra Utara*. Denpasar: Udayana University Press.

Muniarti, Ninuk A, 2004. *Getar Gender*. Magelang: Indonesia Tera.

Pranoto, Surahtono W. 2010. *Teori & Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.

Sadikin, Ali. 1977. *Gita Jaya*. Jakarta: Pemerintah DKI Jakarta.

Sedyawati, Edi., dkk. 1987. *Sejarah Kota Jakarta 1950-1980*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Wasino. 2007. *Dari Riset Hingga Tulisan Sejarah*. Semarang: Unnes Press.

### Skripsi dan Jurnal

Basundoro, Purnawan. 2012. Penduduk dan Hubungan antar Etnis di Kota Surabaya pada Masa Kolonial. Dalam *Paramita*. Volume 22. Hal. 1-13.

Diyanti, Siti Rahma. 2013. Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Betawi di Jakarta pada Masa Kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin 1966-1977. *Skripsi*. Universitas Pendidikan Indonesia.

### Surat Kabar

*Kompas* edisi 27 Agustus 1971

*Kompas* edisi 24 Juli 1971

*Kompas* edisi 29 April 1972

*Kompas* edisi 2 Februari 1973

### Sumber Lisan

Wawancara dengan H. Muhammad Tohir pada 24 Juli 2016 di Jakarta. Mantan Ketua RW. Alamat: Gang. Giban RT.008/01, Grogol Selatan, Kebayotan Lama, Jakarta Selatan.

Wawancara dengan Abdul Caher pada 27 Juli 2016 di Jakarta. Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta. Alamat: Jl. Taman Malaka Utara 5 Blok D8 No. 24/25 Pondok Kelapa, Jakarta Timur.